



THE RELATIONSHIP OF VILLAGE FUNDS TO POVERTY AND ECONOMIC GROWTH IN BANGKA BELITUNG ISLANDS

Sella Agustina Devi Valeriani Aning Kesuma Putri

Abstract. *Poverty is one of the problems in the development process for every country in the world, especially for developing countries, namely Indonesia. One government program that aims to reduce poverty in rural areas is the village fund. Village funds are used to finance governance, development, community development and village community empowerment. Village funds are expected to reduce poverty and increase economic growth in the village. This study aims to determine the relationship and analysis of village funds with poverty and economic growth in the Bangka Belitung Islands Province. The data used are time series data for 2015-2018. The variables in this study are the Village Fund, Poverty, and Economic Growth. The type of data is quantitative data and the source of the data is secondary data. The analytical tool used is the Pearson Correlation. The results showed the relationship between village funds and poverty had a negative relationship, meaning that if village funds increased then poverty would be low and vice versa if village funds were low then poverty would increase. The relationship between village funds with economic growth has a positive relationship, meaning that if village funds increase then economic growth will increase and vice versa if village funds are low then economic growth will fall.*

Keywords: *Village Funds, Poverty, Economic Growth, Pearson Correlation.*

©2021 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam proses pembangunan bagi setiap negara di dunia khususnya bagi negara berkembang yaitu Indonesia. Kemiskinan identik dengan orang yang serba kekurangan, keterbelakangan, ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan, pendidikan rendah, penyakit karena tidak memiliki tabungan untuk masa depan. Dari segi fisik kemiskinan identik dengan tempat tinggal di daerah pedesaan, pesisir pantai, bantaran sungai yang keruh, kotor dan rumah kumuh (Nafiudin, 2018).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 memiliki angka gini rasio sebesar 0,272 berada di bawah gini rasio nasional sebesar 0,384. Bulan September 2018

Sella Agustina (✉)

Universitas Bangka Belitung

Email: sellaagustina4@gmail.com

Devi Valeriani

Universitas Bangka Belitung

Email: deviyono92@gmail.com

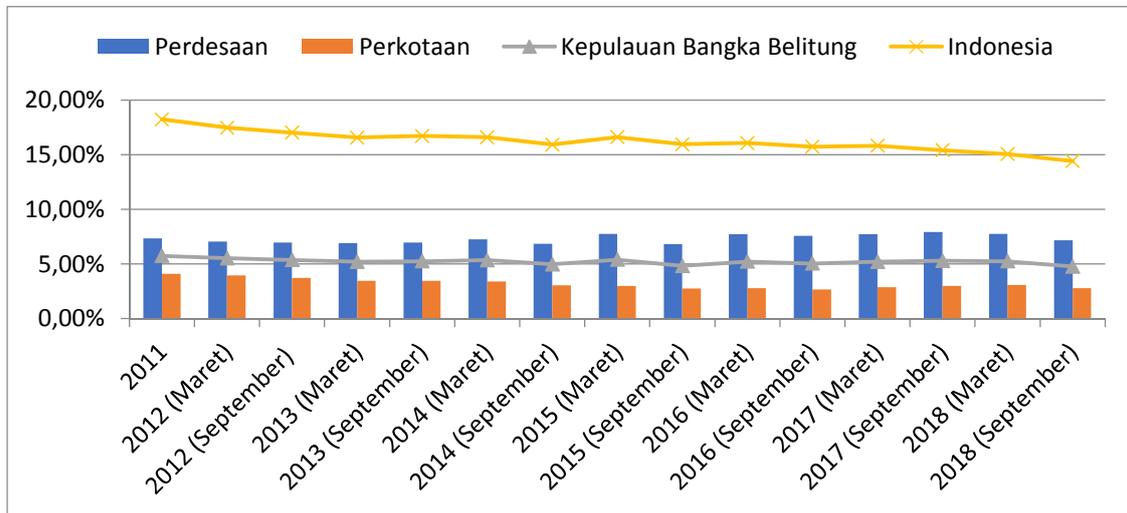
Aning Kesuma Putri

Universitas Bangka Belitung

Email: putrianing@gmail.com

persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,77 persen (69.930 jiwa) dan berada di bawah persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,66 persen (25.674.580 jiwa) (BPS, 2019).

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: bps.go.id, Diolah Peneliti 2019

Gambar 1. Menunjukkan perkembangan persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2011 sampai 2018, mengalami penurunan sebesar 0,98 persen dengan jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 2.130 jiwa, yang terdiri dari penurunan persentase penduduk miskin di wilayah pedesaan sebesar 0,19 persen tetapi jumlah penduduk miskin di pedesaan meningkat sebanyak 970 jiwa dan penurunan persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan sebesar 1,33 persen dengan jumlah penduduk miskin di perkotaan menurun sebanyak 3.100 jiwa. Artinya bahwa wilayah pedesaan menjadi wilayah dengan persentase dan jumlah penduduk miskin lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.

Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan yaitu dana desa. Dana desa yang dimulai sejak 2015 diberikan dalam jumlah tertentu kepada tiap desa di tiap kabupaten bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengatasi masalah kemiskinan, memajukan perekonomian masyarakat, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan serta menjadikan desa-desa tersebut menjadi desa mandiri. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan seperti membangun infrastruktur dasar yang padat karya, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Dana tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan mengurangi kemiskinan di pedesaan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa (PMKRI No. 193/PMK.07/2018).





Desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, dengan menggunakan dana desa tersebut melalui pemberdayaan masyarakat berupa pengembangan usaha peternakan dan perikanan, pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, serta pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa melalui kerjasama antara masyarakat dan aparat desa dalam mewujudkan cita-cita bersama dalam mengentas kemiskinan di desa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018).

Dana desa yang disalurkan akan meningkatkan pendapatan per kapita dan pengeluaran per kapita karena penggunaan dana desa digunakan untuk membuat proyek padat karya (Siregar dan Wahyuniarti dalam Gumilang, 2017). Pendapatan per kapita yang meningkat menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat yang berarti penduduk miskin akan berkurang dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan syarat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, syaratnya hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar di setiap lapisan masyarakat, termasuk lapisan masyarakat yang tergolong penduduk miskin (Siregar dan Wahyuniarti dalam Gumilang, 2017).

Lalira, Nakoko, dan Rorong (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Variabel yang digunakan yaitu dana desa, alokasi dana desa dan kemiskinan. Teknik yang digunakan yaitu analisis regresi data panel dengan metode *random effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel dana desa dan alokasi dana desa tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud (Lalira, Nakoko, dan Rorong, 2018).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menerima dana desa. Berdasarkan data dari BPS tahun 2015-2018 persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia tetapi jika tidak diatasi akan bertambah terus persentase penduduk miskin, rata-rata persentase kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,27 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2018 memiliki rata-rata sebesar 4,28 persen (BPS, 2019).

Untuk melihat sejauh mana dana desa dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi pedesaan dan selanjutnya dapat menurunkan angka kemiskinan, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang “Hubungan Dana Desa Terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolok ukur bagi keberhasilan pembangunan suatu negara, khususnya dibidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk lingkup nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk lingkup wilayah (Septiatin, 2016). Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB atau PDRB (Mankiw dalam Aghnia, 2018).



Prof. Simon Kuznet, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jinghan, 2012).

Sadono Sukirno berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2011).

Jadi pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan nasional riil atau produk domestik bruto dalam jangka panjang yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Fitria, 2016).

Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi Klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2011).

Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber barang mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi akan memerlukan investasi baru (Sukirno, 2011).

Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang (Sukirno, 2011).

Teori pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan Neo-Klasik melihat dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramowitz dan Solow-pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam persamaan, pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$Y = f(K, L, T) \dots\dots\dots(1)$$





Keterangan:

Y adalah tingkat pertumbuhan ekonomi

K adalah tingkat pertumbuhan modal

L adalah tingkat pertumbuhan penduduk

T adalah tingkat perkembangan teknologi (Sukirno, 2011).

B. Kemiskinan

Teori Kemiskinan

Penyebab-penyebab kemiskinan yang disebutkan dalam Kuncoro menghasilkan teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Teori ini ditemukan oleh Ragnar Nurkse (1953) yang mengatakan “*a poor country is poor because it is poor*”. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan yang diterima akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Kuncoro, 2010).

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, kesehatan, pendidikan dan perumahan untuk memperoleh hidup layak. Kemiskinan yang dibiarkan akan berdampak pada berbagai aspek seperti pendapatan yang rendah, tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, dan buruknya lingkungan hidup (*World Bank* dalam Annur, 2013). Kemiskinan juga sering ditandai dengan adanya pengangguran yang tinggi dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi (Nurwati dalam Gumilang, 2017).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain : (1) terpenuhinya kebutuhan pangan, (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan, (3) rasa aman dari perlakuan atau aman tidak kekerasan, (4) hak untuk beradaptasi dalam kehidupan sosial-politik (Bappenas, 2010). BPS mendefinisikan kemiskinan dengan standar garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengatur kemiskinan absolut. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan (BPS, 2018).

Kemiskinan memiliki beberapa jenis (Badrudin dalam Setianingsih, 2016) adalah sebagai berikut.

1. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis



kemiskinan. Penduduk yang berpendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai disebabkan kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan karena tatanan itu tidak hanya menyebabkan kemiskinan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.
4. Kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan.

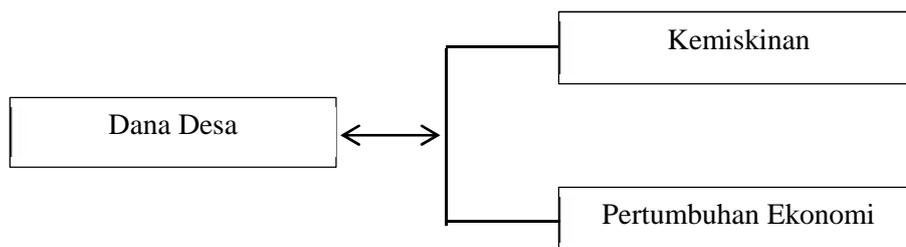
C. Dana Desa

Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri RI No. 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengatasi masalah kemiskinan, memajukan perekonomian masyarakat, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (PMKRI No. 193/PMK.07/2018).

D. Kerangka Berpikir

Gambar 2. Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti, 2019

Berdasarkan kerangka pikir bahwa penyaluran dana desa memiliki hubungan terhadap kemiskinan dan sebaliknya kemiskinan memiliki hubungan terhadap dana desa. Dana desa juga memiliki hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan terhadap dana desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.





E. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis dana desa terhadap kemiskinan:

H₀ = tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dana desa dengan kemiskinan.

H_a = terdapat hubungan yang signifikan antara dana desa dengan kemiskinan.

2. Hipotesis dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi:

H₀ = tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dana desa dengan pertumbuhan ekonomi.

H_a = terdapat hubungan yang signifikan antara dana desa dengan pertumbuhan ekonomi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang di dapat dari pihak ketiga, data dana desa didapat dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung dan untuk data kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi didapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasi pearson atau biasa disebut analisis korelasi product moment digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel secara linier dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Apabila hubungan dua variabel atau lebih memiliki hubungan positif, maka bila nilai satu variabel ditingkatkan, akan meningkatkan variabel yang lain, dan sebaliknya. Apabila hubungan dua variabel atau lebih memiliki hubungan negatif, maka bila nilai satu variabel dinaikkan maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Data yang digunakan berskala interval atau rasio (Priyatno, 2016).

Menurut Sugiyono dalam Priyatno (2016) hasil koefisien korelasi dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. 0,00 – 0,199 = sangat rendah
2. 0,20 – 0,399 = rendah
3. 0,40 – 0,599 = sedang
4. 0,60 – 0,799 = kuat
5. 0,80 – 1,000 = sangat kuat

Rumus Koefisien Korelasi Pearson:

$$r = \frac{n \sum x - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan:

r = nilai korelasi

$\sum x$ = total jumlah variabel x

$\sum y$ = total jumlah variabel y

$\sum x^2$ = kuadrat dari total jumlah variabel x

$\sum y^2$ = kuadrat dari total jumlah variabel y

$\sum xy$ = total hasil perkalian variabel x dan variabel y

(Priyatno, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

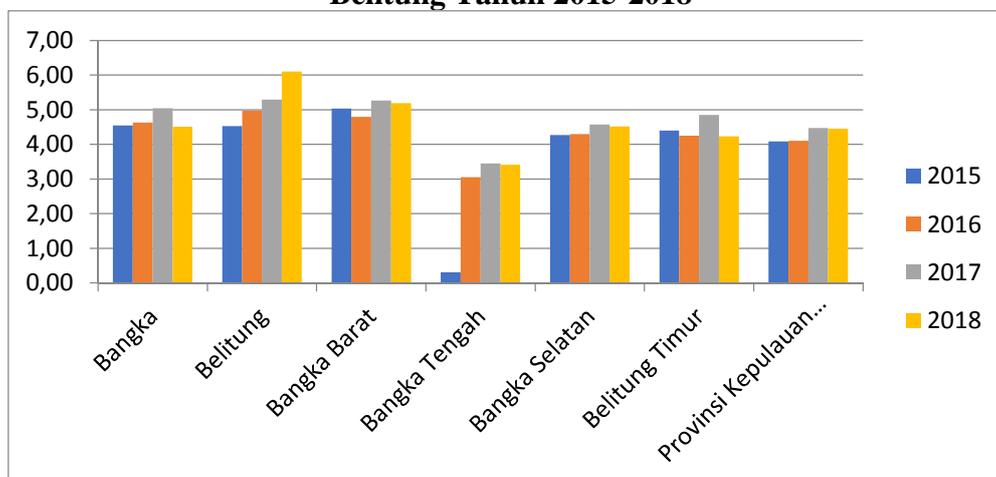
A. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sampai 2018 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfluktuatif. Selama 4 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,47 persen dan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 4,08 persen dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,28 persen.

Struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2018 menurut lapangan usaha didominasi oleh lima lapangan usaha utama, yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan (20,64 persen); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (18,01 persen); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,70 persen); Pertambangan dan Penggalian (10,59 persen); serta Konstruksi (9,73 persen). Naik dan turunnya perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditentukan oleh naik dan turunnya nilai tambah yang dihasilkan oleh kelima lapangan usaha tersebut. Selama 2018, pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali 1) Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian serta 2) Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Kedua lapangan usaha tersebut mengalami kontraksi masing-masing sebesar 1,08 persen dan 5,60 persen.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan berbagai potensi unggulan yang menyokong perekonomian regional. Subsektor pertambangan bijih logam yaitu timah merupakan subsektor unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, terdapat sektor/subsektor yang potensial namun pertumbuhannya melambat dan di bawah pertumbuhan nasional yaitu subsektor pertanian khususnya tanaman perkebunan dan subsektor perikanan. Apabila kedua subsektor tersebut dikembangkan dengan optimal sehingga mampu tumbuh di atas pertumbuhan nasional, maka subsektor tersebut akan menjadi sektor unggulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini mempertimbangkan perkembangan di masa yang akan datang terkait cadangan timah yang semakin berkurang dan dampaknya terhadap lingkungan maupun sektor lain (seperti perkebunan, perikanan, maupun pariwisata) (Kajian Fiskal Regional, 2018).

Gambar 3. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2018



Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka, Diolah Peneliti 2019



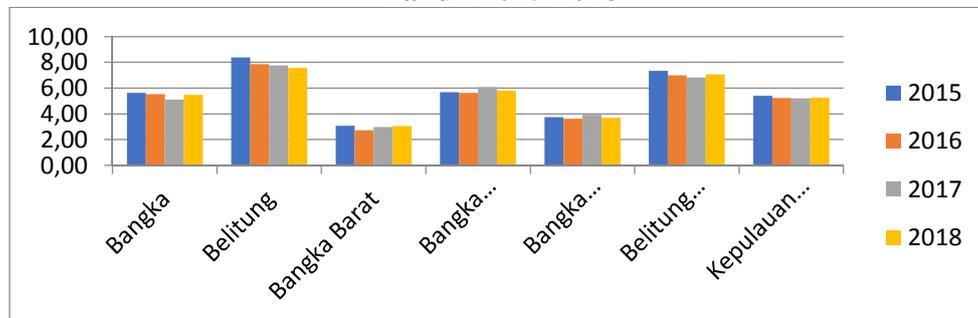


Tahun 2015 sampai 2018 kabupaten dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Belitung. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan sebesar 1,57 persen dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,22 persen, berarti laju pertumbuhan ekonomi di Kabupten Belitung berada di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi dengan selisih sebesar 0,94 persen. Sektor yang berkontribusi tertinggi menyumbang laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 24,98 persen dan sektor yang berkontribusi terendah menyumbang laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 0,02 persen.

Kabupaten dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Bangka Tengah dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonominya berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah selama 4 tahun terakhir sebesar 2,56 persen. Berarti laju pertumbuhan ekonomi di Kabupten Bangka Tengah berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi dengan selisih sebesar 1,72 persen. Sektor yang berkontribusi tertinggi menyumbang laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 17,80 persen dan sektor yang berkontribusi terendah menyumbang laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 0,01 persen.

B. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gambar 4. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2018



Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka, Diolah Peneliti 2019

Berdasarkan Gambar 4. Perkembangan persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sampai 2018 relatif di bawah 6 persen. Persentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 5,40 persen dan terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 5,20 persen, dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 5,27 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sampai 2018 mengalami fluktuasi, jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebanyak 76.260 jiwa dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebanyak 72.760 jiwa. Kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Kabupaten Belitung dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 7,89 persen. Berarti persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung berada di atas rata-rata persentase penduduk miskin Provinsi



dengan selisih sebesar 2,62 persen. Tingginya biaya hidup di Kabupaten Belitung adalah karena daerah ini adalah daerah tujuan wisata, sehingga ada peningkatan daya beli konsumen yang mengakibatkan inflasi. Kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah adalah Kabupaten Bangka Barat dengan rata-rata 2,96 persen. Berarti persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat berada di bawah rata-rata persentase penduduk miskin Provinsi dengan selisih sebesar 2,31 persen.

Garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan tahun 2015 sebesar Rp 488.701 per kapita per bulan dan tahun 2018 sebesar Rp 631.467 per kapita per bulan mengalami peningkatan sebesar Rp 161.653,00. Garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 sampai 2018 memiliki rata-rata sebesar Rp 560.481,75 per kapita per bulan. Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan garis kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Belitung dengan rata-rata garis kemiskinan tahun 2015-2018 sebesar Rp 636.991,50 per kapita per bulan, sedangkan kabupaten dengan garis kemiskinan terendah adalah Kabupaten Bangka Selatan dengan rata-rata garis kemiskinan tahun 2015-2018 sebesar Rp 434.169,00 per kapita per bulan.

Faktor utama pendorong tingginya Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari komponen garis kemiskinan komoditas makanan (GKM) yang memberi kontribusi sebesar 72,59 persen. Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tingginya rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat untuk membeli komoditas makanan seiring dengan tingginya tingkat inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong kenaikan garis kemiskinan secara keseluruhan. Penurunan signifikan tingkat kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung didorong oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi, pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian, dan penurunan tingkat pengangguran selama 2018. Pemerintah daerah menetapkan UMP 2018 meningkat 8,71 persen dibandingkan 2017. Selama 2018, PDRB lapangan usaha pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar tumbuh sebesar 5,49 persen (Kajian Fiskal Regional, 2018).

C. Perkembangan Dana Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dana desa yang diberikan di tiap kabupaten memiliki jumlah yang berbeda-beda dikarenakan pagu dan transmisi kebijakannya disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin serta tingkat kesulitan geografis yang berbeda di tiap kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyaluran dana desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami peningkatan sebesar 187,51 persen.





Tabel 1. Dana Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2018

Wilayah Babel	Dana Desa			
	2015	2016	2017	2018
Kab. Bangka	18.136.526.000	40.696.985.000	51.955.343.000	51.813.670.000
Kab. Belitung	12.892.222.000	28.936.275.000	36.381.965.000	38.742.236.000
Kab. Bangka Barat	17.494.100.000	39.254.113.000	49.947.647.000	48.509.328.000
Kab. Bangka Tengah	16.429.343.000	36.870.181.000	46.833.209.000	47.422.068.000
Kab. Bangka Selatan	14.901.133.000	33.436.993.000	42.454.691.000	42.476.581.000
Kab. Belitung Timur	12.074.236.000	27.099.065.000	34.088.724.000	35.607.842.000
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	91.927.560.000	206.293.612.000	261.661.579.000	264.571.725.000

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tahun 2015 jumlah dana desa yang disalurkan sebesar Rp 91,93 milyar, rata-rata setiap kabupaten menerima dana desa sebesar Rp 15,32 milyar. Tahun 2016 jumlah dana desa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 124, 41 persen menjadi Rp 206,29 milyar, rata-rata setiap kabupaten menerima dana desa sebesar Rp 34,38 milyar. Tahun 2017 jumlah dana desa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 26,84 persen menjadi Rp 261,66 milyar, rata-rata setiap kabupaten menerima dana desa sebesar Rp 43,61 milyar. Tahun 2018 jumlah dana desa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,01 persen menjadi Rp 264,3 milyar dengan rata-rata setiap kabupaten menerima dana desa sebesar Rp 44,05 milyar.

Kabupaten yang menerima dana desa tertinggi dari tahun 2015 sampai 2018 yaitu 1) Kabupaten Bangka, 2) Kabupaten Bangka Barat, 3) Kabupaten Bangka Tengah, 4) Kabupaten Bangka Selatan, 5) Kabupaten Belitung, dan 6) Kabupaten Belitung Timur.

Pemanfaatan dana desa terdapat dua bidang prioritas dalam penggunaan Dana Desa yaitu bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa pada dua bidang ini diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Output pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan penggunaan Dana Desa terkonsentrasi pada pemenuhan pelayanan dasar.



Tabel 2. Capaian Output Dana Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2018

Capaian Output	2017	2018
Embung Desa	10 Unit	12 Unit
MCK	838 Unit	607 Unit
Jalan Desa	808 Km	174 Km
Pasar Desa	36 Unit	17 Unit
Jembatan	70 Meter	158 Meter
PAUD	78 Unit	70 Unit
Sumur	165 Unit	250 Unit
Drainase & Irigasi	26 Meter	66 Meter
Posyandu/Polindes	32 Unit	38 Unit
Sambungan air bersih	88 Unit	20 Unit

Sumber: Kajian Fiskal Regional, 2018

D. Uji Korelasi atau Hubungan Dana Desa Terhadap Kemiskinan

Tabel 3. Hasil Korelasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan

	Dana Desa	Kemiskinan
Dana Desa	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	0,061
	N	4
Kemiskinan	Pearson Correlation	-0,939
	Sig. (2-tailed)	0,061
	N	4

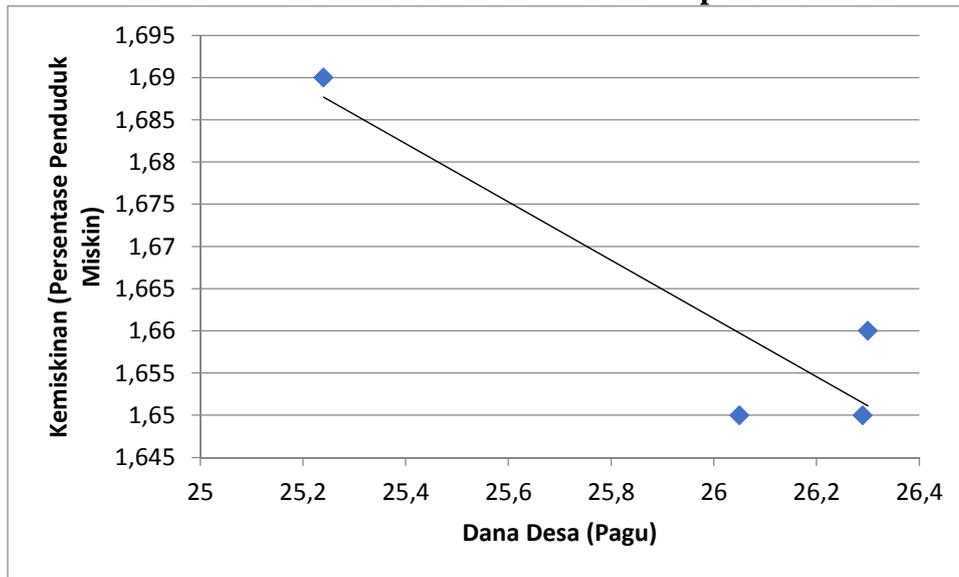
Sumber: Diolah Peneliti, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi sebesar $r_{hitung} -0,94$ yang berarti bahwa keeratan hubungan antara variabel dana desa dengan kemiskinan sebesar 94 persen yang berarti hubungannya sangat kuat dan negatif serta tidak signifikan dikarenakan $r_{hitung} -0,94 < r_{tabel} 0,90$ dengan taraf signifikansi sebesar 5 persen. Uji signifikansi menunjukkan bahwa $0,061 > 0,05$ berarti hubungan antara dana desa dan kemiskinan tidak signifikan. Jadi H_0 diterima dan H_a di tolak.





Gambar 5. Garis Linier Dana Desa Terhadap Kemiskinan



Sumber: Diolah Peneliti, 2019

Berdasarkan grafik linier korelasi antara dana desa dengan kemiskinan memiliki hubungan yang negatif, artinya jika dana desa meningkat maka kemiskinan akan rendah dan sebaliknya jika dana desa rendah maka kemiskinan akan meningkat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E. Uji Korelasi atau Hubungan Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4. Hasil Korelasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

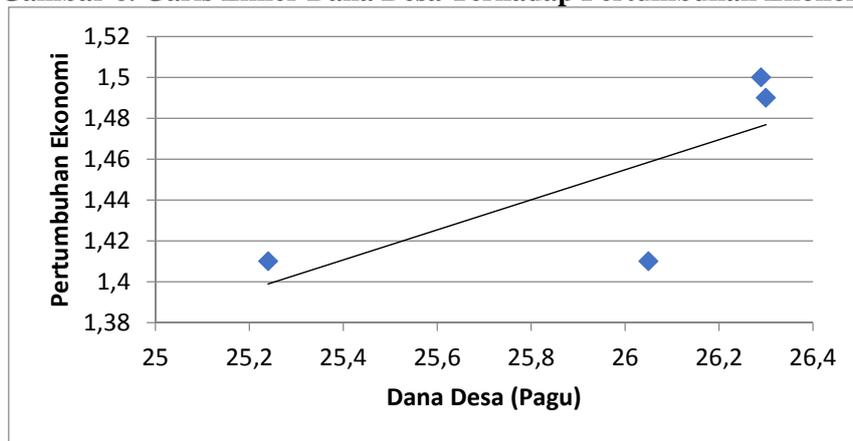
	Dana Desa	Pertumbuhan Ekonomi
Dana Desa	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	0,774
	N	4
Pertumbuhan Ekonomi	Pearson Correlation	0,774
	Sig. (2-tailed)	1
	N	4

Sumber: Diolah Peneliti, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi sebesar r_{hitung} 0,774 yang berarti bahwa keeratan hubungan antara variabel dana desa dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 77,4 persen yang berarti hubungannya kuat dan positif serta tidak signifikan dikarenakan r_{hitung} 0,774 < r_{tabel} 0,90 dengan taraf signifikansi sebesar 5 persen. Uji signifikansi menunjukkan bahwa $0,226 > 0,05$ berarti hubungan antara dana desa dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Jadi H_0 diterima dan H_a di tolak.



Gambar 6. Garis Linier Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Diolah Peneliti, 2019

Korelasi antara dana desa dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif, artinya jika dana desa meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan sebaliknya jika dana desa rendah maka pertumbuhan ekonomi akan turun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Hubungan antara dana desa dengan kemiskinan memiliki hubungan yang negatif, artinya jika dana desa meningkat maka kemiskinan akan rendah dan sebaliknya jika dana desa rendah maka kemiskinan akan meningkat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Hubungan antara dana desa dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif, artinya jika dana desa meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan sebaliknya jika dana desa rendah maka pertumbuhan ekonomi akan turun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghnia, Nadya Larasati. 2018. Pengaruh Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia [skripsi]. Bogor: Institusi Pertanian Bogor.
- Annur, Reza Attaburrobbi. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Diakses Tanggal: 24 Juli 2019.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. Diakses Tanggal: 8 Juli 2019
- BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2019. *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka*. Pangkalpinang.
- Dewi, Ratna Sari Dkk. 2018. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara: Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.





- Fitria, Dhita Nur Elia. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1984-2013 [skripsi]. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Gumilang, Muhammad Fajar. 2017. Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bogor [skripsi]. Bogor: Institusi Pertanian Bogor.
- Jinghan, M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali pers.
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung. 2019. *Kajian Fiskal Regional*. Pangkalpinang.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses Tanggal: 11 Juli 2019.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses Tanggal: 22 Juli 2019.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 4*. Jakarta: PT Erlangga.
-2010. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Lalira, Dianti Dkk. 2018. Pengaruh Dana Desa dan Aloaksi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Manado: Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 18 Nomor 04 Tahun 2018.
- Maulana, M. Indra. 2018. Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam [skripsi]. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Nafiudin, Muhammad. 2018. Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang [skripsi]. Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ngongano, Yuliana. 2011. Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan. Tobelo: Universitas Halmahera.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 Bab IV Tentang Pengalokasian dan Bab V Tentang Penyaluran.
- Priyanto, Duwi. 2016. *SPSS Handbook Analisis Data, Olah Data, & Penyelesaian Kasus-kasus Statistik*. Yogyakarta: Penerbit MediaKom.
- Ringo, Elisabeth Siringo. 2017. Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah [skripsi]. Lampung: Universitas Lampung.
- Setianingsih, Irma. 2016. Kontribusi Dana Desa dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi.
- Soemantri, I Wayan. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*. Volume 6 Nomor 1.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susilowati, Nilam Indah Dkk. 2017. Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Volume I Jilid 2/ 2017 Hal 189-202.



Sella Agustina, dkk., *The Relationship of Village Funds to Poverty and Economic Growth in Bangka Belitung Islands.*

Waniarsih. 2017. Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 2009-2015 [skripsi]. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

